

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm, 10.
- Lexy J. Moleog, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hal 6
- Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafida, Penelitian Kualitatif (sebuah pengantar),(  
Bandung: Alfabeta. 2011) hal 47
- Djam'an Satori dan Aan Komaitiah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,  
2013) hal 130
- Nasution, Bahder Johan (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Jakarta: MandarMaju.  
Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Desa, Otonomi. "BAB II OTONOMI DESA." Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (2018): 9
- Riwu Kaho, Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia(Cetakan ke-  
4),PT.RajaGrafindo Persada, 1997
- Wijaya, HAW, (2004). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut  
terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
Tentang Pemerintahan Daerah Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten  
Kutai Kalimantan Timur, 2000.
- Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidiah. "Pemerintahan desa." (2015).hlm 115-116
- Suradinata, DR Ermaya. Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit. Elex Media  
Komputindo, 2013, hlm11
- Widjaja, Haw. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada.
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga,  
Jakarta. h. 73
- Nurcholis, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang :  
Setara Press, 2014), hlm. 22
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Bumi Aksara, 2021.  
Hlm 12.

- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 71
- Husaini Usman. *Manajemen*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Taufiqurokhman, D. R., S. Sos, and M. Si. "Konsep dan kajian ilmu perencanaan." Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama (2008). Hlm 3
- Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), hlm. 40. 27 Sondang P. Siagian , *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 5
- Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hal. 10
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015 “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, hlm 90.
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum*
- Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 352
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo 2003. *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, *Majalah Swara MEP*, Vol. 3 No. 8 Maret. Yogyakarta: MEP UGM.
- Didjaja, Mustofa. 2003. *Transparansi Pemerintah* . Jakarta: Rineka Cipta
- Kristanten.2006 *Transparansi Anggaran Pemerintah* . Jakarta: Rineka Cipta
- Kurnianingrum, F., Shandar, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021). *Buku I: Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa*. Ditjen Bina Pemerintahan Desa
- Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R.(2021b). *Buku IV: Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

## Majalah

DRS. RAHMAT JUNAI, S.H.,M.H., “ARTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAGI APARAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

## Internet

Kompas.com, “KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan”, 28 September 2022  
<https://amp.kompas.com/regional/read/2022/09/28/230628878/kpk-sebut-korupsi-dana-desa-masuk-3-kasus-terbanyak-dalam-korupsi> diakses pada 2 Oktober 2023, pukul 19:54

## Jurnal

SAVITRI, INDIRA PUTRI, and Reiza Wirambra. Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Indra, Mexasai, and Emilda Firdaus. Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diss. Riau University, 2015.

Enggarani, Nuria Siswi. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali." *Law and Justice* 1.1 (2016): 16-29.

Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura Ara Lili, Marselina (2018). “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan”

Suyono, Djoko, and Fajar Eko Agung Prakoso. "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017." *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 1.1 (2018).

Lasari, Putri Aril, Khoiron Khoiron, and Taufiq Rahman Ilyas. "MENINJAU ULANG KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)(Studi Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tamankuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang)." *Respon Publik* 17.10 (2023): 74-80.

Permatasari, Kartika. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Diss. Brawijaya University, 2013

- Irawati, Erni. "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.2 (2021): 635-642.
- Barniat, Zulman. "Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal." *Jurnal analisis sosial politik* 2.2 (2018): 25-40.
- Rahmi Kurnia, Nurzia Sebrina dan Halmawati, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" (Univertitas nEgeri Padang 1, No. 1 2019), h. 163
- Solihin, Danna, Janiel Lukisyo dan Titin Ruliana. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Lakan Bilem kecamatan Nyutan Kabupaten Kutai Barat)." *Ekonomi* 9.1 (2020); 151-156.
- Lilis Saldah Napisah, "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung"(STIE Ekuitas Bandung 6, No.2 2020), h 81
- Arfiansyah, M.A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal Of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Rosy Armairni, "Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung". (Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya 1 NO 1, 2017), H 59.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79-88.
- Sangki, A. A., Gospal, R., & Kairupan, J. (2017) Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Boaalang Mongondow). *Jurnal Eksekutif* 1(1)
- Gafar, T. Fahrul, et al. "Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 207-218. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/501>
- Suryaningsih, Suryaningsih, et al. "Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rancangan Anggaran Kas (RAK) Sesuai Dengan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Nusantara Berbakti* 1.3 (2023): 31-39. <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181>

Yondaningtiyastuti, Septy. "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (Ritmik)* 4.3 (2022): 177-190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622>

Suryaningsih, S., Putri, R. P., Zamhasari, Z., & Gafar, T. F. (2023). Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Sesuai Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 31–39. <https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181>

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019